

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Inspektorat berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada

Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani. Inspektorat merupakan perangkat daerah yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pengawasan mempunyai pelayanan strategis, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **1.2 Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **1.3 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.

## 7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mojokerto Tahun 2018-2023

### 1.4 Rencana Kerja

#### 1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana

Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh Inspektorat dengan SDM yang dimilikinya

- Penyiapan Bahan, berupa :

a. Kuesioner.

b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar

c. Kelengkapan peralatan.

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

a. Jumlah Responden.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

- Penyusunan Jadwal

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.\

#### 1.4.2 . Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.

- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah

## **BAB II METODOLOGI**

### **2.1 Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### **2.2 Populasi Dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Inspektorat. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*.

*Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### **2.3 Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Inspektorat.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Inspektorat.

#### **2.4 Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 100 responden.

Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh Inspektorat akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks

persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

<b>NILAI PERSEPSI</b>	<b>NILAI INTERVAL</b>	<b>NILAI INTERVAL KONVERSI IPK</b>	<b>MUTU</b>	<b>KINERJA</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 2.5	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51– 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
<b>4</b>	<b>3.26 – 4.00</b>	<b>81.26–100.00</b>	<b>4</b>	<b>Bersih dari korupsi</b>

## 2.6 Ruang lingkup

Ruang lingkup dari survey persepsi korupsi adalah :

1. Manipulasi Peraturan
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transaksi Biaya
5. Biaya Tambahan

6. Hadiah
7. Transparansi Biaya
8. Percaloan
9. Perbuatan Curang
10. Transaksi Rahasia

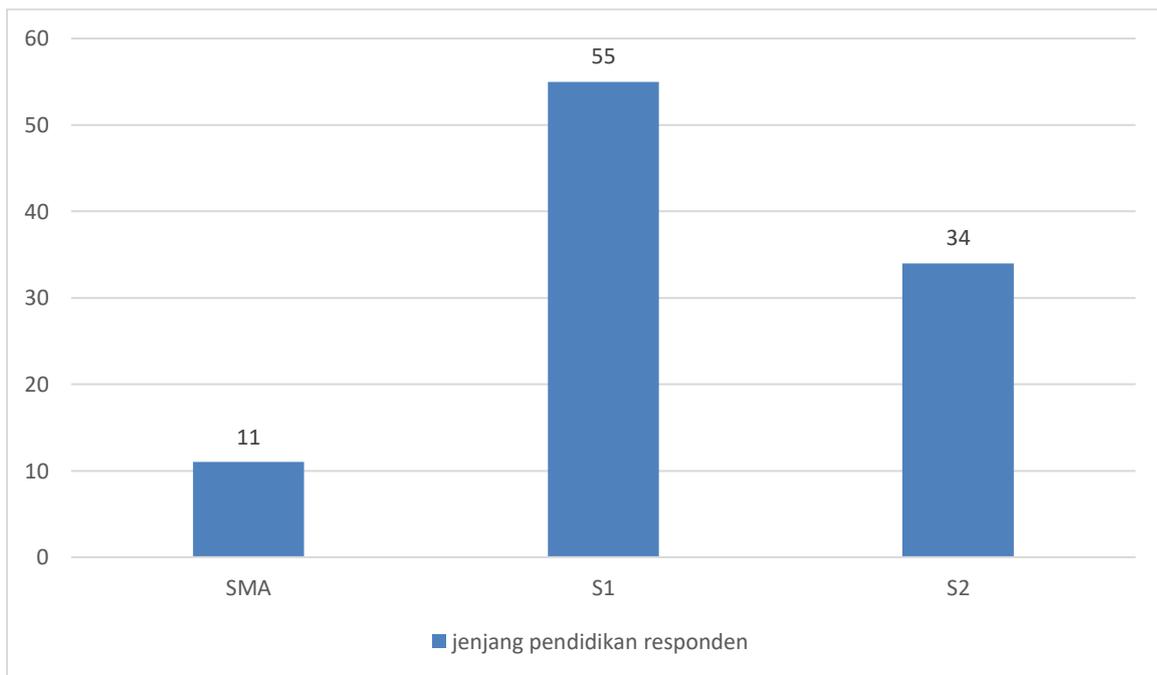
**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1 Profil responden**

**3.1.1 Tingkat pendidikan responden**

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Inspektorat mayoritas memiliki pendidikan Strata 1, data pendidikan responden terinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1  
Jenjang Pendidikan responden



### 3.1.2 Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 67 responden pengguna layanan Inspektorat khususnya konsultasi adalah karena layanan utama inspektorat adalah konsultasi, dimana yang paling banyak melakukan konsultasi adalah PNS di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto

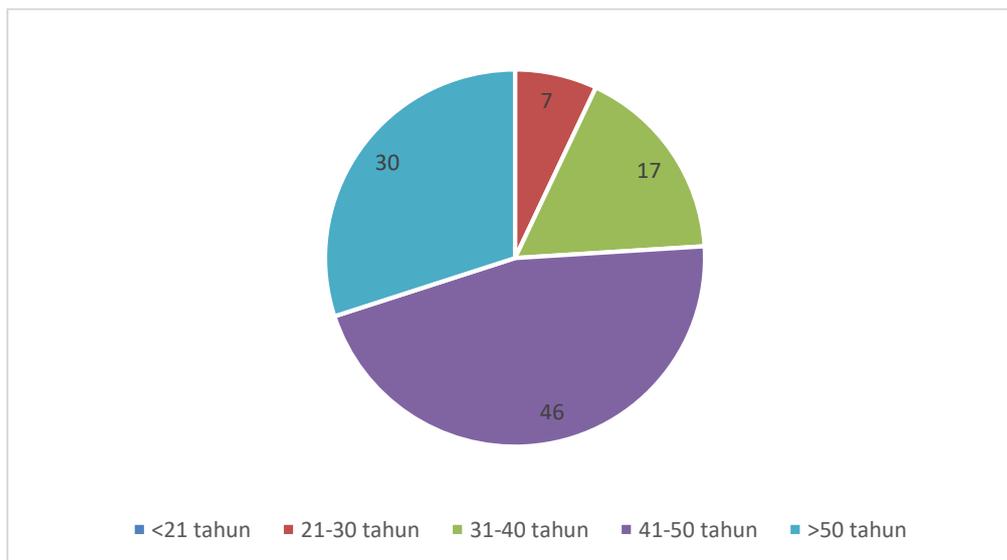
Tabel 3.2  
Jenis Pekerjaan Responden

No.	Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	67	67%
2	TNI	00	0%
3	POLRI	0	0%
4	SWASTA	0	0%
5	WIRUSAHA	0	0%
6	Lainnya	33	33%
	Jumlah	100	

### 3.1.3. Kelompok Usia Responden

Dari kelompok usia, mayoritas pengguna layanan inspektorat adalah berusia produktif, data responden berdasarkan kelompok usia terperinci dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.3  
Kelompok Usia Responden



### 3.2 Indeks persepsi korupsi per indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,82. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari manipulasi peraturan

#### 3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,89. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari Penyalahgunaan jabatan

#### 3.2.3 Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator menjual pengaruh menunjukkan pada indeks 3,79. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari menjual pengaruh

#### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,77. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari transaksi biaya.

#### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,57. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari biaya tambahan.

#### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,43. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari Hadiah.

#### 3.2.7 Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,45. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Transparansi biaya

#### 3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,84. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari percaloan

#### 3.2.9 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada indeks 3,68. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari Perbuatan Curang.

### 3.2.10 Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,76. Indeks ini dapat diartikan bahwa kinerja Inspektorat Bersih dari Transaksi Rahasia

## 3.3 Indeks Persepsi Korupsi Inspektorat

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Inspektorat sebesar 3,70.

Indeks Persepsi Korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **3.26 – 4.00** atau 81.26 – 100.00.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Inspektorat Kota Mojokerto diperoleh informasi bahwa pada Inspektorat Kota Mojokerto memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,70** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,82
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,89**
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,79
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,77**
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,57**
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,43**
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,45**
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,84**
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,68**
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,76**

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Inspektorat Kota Mojokerto Semester pertama Tahun 2020 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,26** atau masuk pada persepsi **Bersih dari Korupsi** Namun dari sepuluh indikator tersebut

menunjukkan bahwa indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.